

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Thailand adalah negara yang tak pernah mengalami penderitaan pendudukan kolonial, meskipun berada ditengah - tengah ekspansi kolonial yang hampir mengelilingi sebagian besar Negara di Asia Tenggara. Sejak tahun 1932 Thailand beberapa kali telah mengalami perebutan kekuasaan silih berganti antara konstitusionalisme dan pengambilalihan kekuasaan yang tidak sah oleh militer. Kudeta¹ yang paling akhir terjadi di Thailand adalah tahun 1991 dan setelah itu hampir tidak pernah terjadi tindakan kudeta. Setelah 15 tahun tidak terjadi kudeta pada tanggal 20 September 2006 terjadi lagi kudeta militer di Thailand. Kudeta tersebut dilancarkan oleh anggota – anggota Angkatan Darat Kerajaan Thailand terhadap pemerintahan Perdana Menteri Thaksin Shinawatra.²

Selama beberapa dekade terakhir militer di Thailand memiliki peran yang dominan dalam kehidupan politik. Hampir semua Perdana Menteri Thailand sejak 1932 dilatarbelakangi oleh orang dari militer. Militer seringkali merebut

¹Kudeta secara sederhana dapat diartikan sebagai kegiatan - kegiatan yang dilakukan untuk merebut kekuasaan atau aksi politik untuk menggantikan (mendominasi) suatu kelompok atau rezim yang menjadi saingannya dengan rezim sendiri. Baca, Eric A. Nordlinger, 1990, *Militer Dalam Politik : Kudeta dan Pemerintahan*, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 150.

²Sri Issundari. "Latar Belakang Kudeta Militer Thailand Pada Masa Pemerintahan PM Thaksin Shinawatra," *Jurusan Hubungan Internasional UPN "Veteran" Yogyakarta*, Vol. 12 No. 4, Desember 2008, hal. 203.

kekuasaan dari pemerintah sipil dengan cara kekerasan atau sebagai pretorian maya dengan kekuatan luar biasa untuk memveto atau pemerasan terhadap pemerintah non - militer. Kudeta yang terakhir terjadi pada masa pemerintahan Perdana Menteri Thaksin Shinawatra.

Posisi militer nasional dalam sebuah negara pastinya mempunyai peran yang penting sebagai pelindung negara dari berbagai macam ancaman, terutama ancaman militer. Militer mempunyai peran sebagai pertahanan suatu negara, dengan kata lain, militer mempunyai tugas di bidang pertahanan (*defense*).

Dalam hubungan militer dengan sipil dapat diasumsikan bahwa militer dibentuk guna membantu serta menopang dalam pemerintahan sipil. Namun, dengan tujuan utamanya adalah untuk bertempur sebagai alat pertahanan negara. Militer tidak boleh ikut campur dengan hal - hal yang berkaitan dengan *ipoleksosbud*³ dan begitu juga dengan pemerintahan sipil (non - militer) tidak boleh ikut campur mengenai urusan militer atau *defense*. Dari paparan di atas, itulah gambaran bagaimana militer menjadi salah satu badan yang otonom dan bisa disebut professional yang karenanya hanya mengurus dan bertanggung jawab pada bidang *defense*.

Namun, dalam negara berkembang pihak militer dalam fungsinya selalu ikut campur dalam pemerintahan yang sedang berkuasa, oleh karena itu, pemerintahan yang sedang berkuasa pasti menjalin hubungan kerjasama dengan pihak militer guna menjaga kestabilan dan keamanan untuk mencapai tujuan suatu

³Ipoleksosbud adalah singkatan dari kata ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya.

negara dibidang ekonomi dan sosial masyarakat.⁴ Kegagalan pemerintahan sipil membuat pihak militer merasa penting untuk melakukan campur tangan. Salah satu faktor pendorong intervensi⁵ militer dalam ranah politik adalah instabilitas politik termasuk kudeta militer pada masa pemerintahan Thaksin Shinawatra, kepemimpinan Thaksin Shinawatra yang dianggap menyalahi konstitusi membuat militer merasa harus bertanggung jawab untuk ikut andil dalam memperbaiki negara dari pengaruh pemerintahan yang tidak stabil.

Sedangkan ini tidak lazim terjadi pada era demokrasi yang menempatkan sipil diatas institusi militer. Kudeta militer pada masa pemerintahan Perdana Menteri Thaksin Shinawatra digulingkan oleh pihak militer yang dilakukan oleh Pasukan Khusus Angkatan Darat Kerajaan Thailand di bawah pimpinan Panglima Angkatan Darat Jenderal Sonthi Boonyaratglin dan didukung oleh Raja Bhumibol Adulyadej.⁶

Beberapa tahun sebelum terjadinya kudeta, pada tahun 2001 diadakan pemilu pertama sejak diberlakukannya Konstitusi Rakyat 1997 yang berlangsung di bawah konstitusi reformis, dimana sejak tahun 1990-an pergantian kekuasaan selalu diwarnai dengan kudeta militer. Pemilu yang berjalan demokratis yang mengikutsertakan 37 Partai Politik. Dari sekian banyak partai politik yang ikut merayakan pesta demokrasi di Thailand, hanya tersedia 500 kursi di parlemen.

⁴Junita Setiana Ginting, 2003, *Pretorian dalam Perkembangan Politik Negara Berkembang*, Fakultas Satra, Universitas Sumatera Utara, hal 1.

⁵Intervensi adalah sebuah perbuatan atau tindakan campur tangan yang dilakukan oleh satu lembaga (badan) terhadap sebuah permasalahan atau pertikaian yang terjadi di antara dua pihak atau beberapa pihak sekaligus, dimana tindakan yang dilakukan tersebut akan merugikan salah satu pihak yang sedang bertikai.

⁶Surya Yudha Regif, *Op. Cit.* hal., 35.

Partai Thai Rak Thai (Rakyat Thai Mencintai Sesama Rakyat Thai) berhasil memenangkan pemilu dengan meraih 248 kursi di parlemen dan pada tahun tersebut dengan diangkatnya Thaksin Shinawatra menjadi Perdana Menteri Thailand. Partai Thai Rak Thai didirikan pada tahun 1998 dan Thaksin Shinawatra yang menjadi anggota parlemen. Sejak awal berkuasa pada tahun 2001 melalui kemenangan dalam pemilu, sebenarnya program kerja Thaksin Shinawatra bisa dikatakan berhasil, diantaranya yaitu Thaksin Shinawatra berhasil membawa Thailand keluar dari krisis finansial terutama terbebas dari pinjaman dana IMF setelah Korea Selatan, bahkan pada tahun 2004 tercatat Thailand merupakan negara yang mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi hampir 7% dibanding negara - negara tetangganya.⁷

Selain itu Thaksin Shinawatra juga sangat populer di mata masyarakat miskin terkait dengan beberapa kebijakannya yaitu mengembangkan kebijakan OTOP (*One Tambon One Product*), terutama program kerjanya yang salah satunya adalah menolong atau meningkatkan kesejahteraan petani miskin di pedesaan melalui program UKM (Usaha Kecil Menengah) dan pemberian subsidi BBM (Bahan Bakar Minyak) dan listrik, selain itu, juga ada program pelayanan kesehatan murah di rumah sakit milik negara.⁸

Untuk program pelayanan kesehatan pemerintah bagi masyarakat miskin dengan cara memberikan kesempatan kepada masyarakat miskin untuk pergi ke

⁷Sri Issundari. "*Latar Belakang Kudeta Militer Thailand Pada Masa Pemerintahan PM Thaksin Shinawatra.*"Jurusan Hubungan Internasional UPN "Veteran" Yogyakarta, Vol. 12 No. 4, Desember 2008, hal. 203.

⁸*Ibid.*

dokter dan memperoleh jaminan (asuransi) kesehatan sebanyak 35 baht (setara dengan 1 dollar).⁹

Thaksin Shinawatra juga dinilai sangat berpengaruh, khususnya bagi masyarakat pedesaan, karena bagi kaum petani dan masyarakat miskin pedesaan maupun perkotaan, Thaksin Shinawatra merupakan pemimpin pertama di Thailand yang mau terjun langsung ke masyarakat guna mendengarkan aspirasi masyarakatnya dan kaum petani, Thaksin Shinawatra terkenal sebagai Perdana Menteri pertama yang mampu memenuhi semua janji dalam kampanyenya.

Terjadinya kudeta yang berhasil menggulingkan pemerintahan Perdana Menteri Thaksin Shinawatra sangat kontradiksi dengan keberhasilan Thaksin Shinawatra selama memimpin Thailand, bahkan kudeta yang terjadi pada masa pemerintahan Thaksin Shinawatra justru dikaitkan dengan *necessary evil* (kejahatan yang perlu dilakukan).

Namun, pemerintahan Thaksin Shinawatra menuai kontroversi dan tentangan dari berbagai pihak. Kontroversi dan tentangan tersebut muncul karena Thaksin Shinawatra dinilai mulai menyalahgunakan kekuasaan yang dimilikinya sebagai Perdana Menteri. Dimulai dari kasus korupsi segenap kroni dan keluarganya sampai pada permasalahan yang muncul akibat tindakan pemberantasan narkoba di Selatan Thailand yang terbukti melanggar HAM.¹⁰

Dari hal - hal kontroversi dan pelanggaran yang dilakukan oleh Thaksin Shinawatra, satu hal yang menjadi permasalahan utama pada pemerintahan

⁹Sri Issundari. "Latar Belakang Kudeta Militer Thailand Pada Masa Pemerintahan PM Thaksin Shinawatra." Jurusan Hubungan Internasional UPN "Veteran" Yogyakarta, Vol. 12 No. 4, Desember 2008, hal. 206.

¹⁰Kusumawardani, *Op.cit.*, hal. 45-47.

Thaksin Shinawatra ini adalah upaya Thaksin untuk melemahkan peran Raja Bhumibol Adulyadej. Dan, harus diperhatikan bahwa Raja Bhumibol Adulyadej adalah panutan yang sangat dihormati dan selalu dijadikan segala solusi akhir jika ada masalah politik yang tidak bisa diselesaikan bagi seluruh rakyat Thailand. Raja mempunyai tiga peranan yang merupakan sumber kekuatan moral dalam sejarah politik maupun kehidupan dalam berbangsa dan bernegara di Thailand. Upaya pelemahan pada peran Raja yang dilakukan oleh Thaksin Shinawatra yaitu dimulai dari pencopotan birokrat dan pejabat Negara yang memiliki kedekatan khusus dengan Kerajaan pada saat itu.¹¹

Thaksin Shinawatra juga sering mengabaikan perintah dan masukan Raja dalam hal perpolitikan. Bahkan perlahan Thaksin dinilai telah berupaya untuk menghilangkan kharisma yang dimiliki Raja Bhumibol Adulyadej dimata masyarakat Thailand dengan cara memandang Raja Bhumibol Adulyadej seperti rakyat biasa, contohnya pada saat Thaksin Shinawatra menawarkan pemberian kartu jaminan kesehatan gratis saat Raja Bhumibol Adulyadej dirawat di Rumah Sakit sekitar tahun 2002.

Pada tahun 2005 Thaksin Shinawatra bersama partai Thai Rak Thai menuai kesuksesan kembali dengan terpilihnya lagi Thaksin Shinawatra sebagai Perdana Menteri. Tidak hanya itu juga, partai Thai Rak Thai juga mendapatkan 364 dari 500 kursi parlemen. Akibat dominasi kursi di dalam parlemen oleh partai Thai Rak Thai, muncul-lah berbagai kritikan oleh pihak oposisi dan media. Kritikan ini muncul karena adanya pandangan bahwa dominasi kursi didalam

¹¹Johanes D Schmidt, 2007, "*The External Relations of The Monarchy in Thai Politics*", Aalborg Universitet Paper, hal.3.

parlemen dapat mengakibatkan kesenjangan politik didalam pemerintahan Thailand. Hingga pada akhirnya Raja Bhumibol Adulyadej harus ikut angkat bicara guna meredam pertikaian politik supaya tidak berlanjut.

Tercatat sejak tahun 1932 - 2006, telah terjadi 23 kudeta militer dan 18 kali perubahan konstitusi.¹² Hal ini menandakan intervensi militer dalam perpolitikan di Thailand relatif kuat. Meski dalam hal ini supremasi militer atas sipil terlihat dalam politik di Thailand, akan tetapi peran Raja sebagai Kepala Negara sangatlah penting dimata masyarakat Thailand. Sebagai pemimpin tertinggi di Thailand, Raja Bhumibol Adulyadej, Raja Thailand saat ini adalah tempat terakhir dalam mengakhiri kebuntuan politik.

Kudeta merupakan salah satu bentuk dari intervensi militer dalam politik. Dalam kaitannya dengan pelaksanaan demokrasi, kudeta merupakan bukti kemunduran bagi perkembangan demokrasi di suatu Negara. Yang menjadi menarik dalam penelitian ini adalah dalam proses demokrasi di Thailand adanya campur tangan militer serta hubungan sipil dan militer.

1.2. Rumusan Masalah

Dari paparan diatas, dapat diambil rumusan masalah mengenai hubungan sipil - militer Thailand yakni “bagaimana hubungan antara sipil dan militer di Thailand pada masa pemerintahan Perdana Menteri Thaksin Shinawatra”?

¹²Lidya Christin Sinaga, *Jalan Panjang Demokrasi Thailand*, diakses dalam <http://www.politik.lipi.go.id/index.php/in/kolom/politik-internasional/361-jalan-panjang-demokrasi-thailand->, (11/12/2018, 19:00 WIB).

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini ada beberapa tujuan yang ingin diungkap oleh peneliti :

1. Untuk mengetahui faktor penyebab kudeta atas lengsernya Perdana Menteri Thaksin Sinawatra.
2. Untuk mengetahui bagaimana hubungan sipil di Thailand pada masa pemerintahan Perdana Menteri Thaksin Sinawatra.

1.3.2. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis : Penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan peneliti serta pembaca mengenai hubungan sipil militer di Thailand pada masa pemerintahan Thaksin Shinawatra.
2. Manfaat Akademis : Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih dalam pengembangan bidang studi Hubungan Internasional.

1.4. Kajian Pustaka

1.4.1. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, penelitian terdahulu dijadikan sebuah acuan bagi peneliti untuk membedakan antara penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya dengan penelitian yang peneliti buat. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan enam penelitian terdahulu.

Untuk penelitian **pertama** yang berkaitan dengan pembahasan ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Sri Issundari tahun 2008 dari UPN “Veteran” Yogyakarta yang berjudul “*Latar Belakang Kudeta Militer Thailand pada masa*

Pemerintahan PM Thaksin Shinawatra".¹³ Dalam penelitian ini membahas mengenai kudeta militer serta latar belakang dilakukannya kudeta terhadap pemerintahan saat itu. Pemerintahan yang dipimpin oleh Perdana Menteri Thaksin Shinawatra. Kudeta militer yang terjadi karena adanya faktor internal maupun faktor eksternal.

Penelitian ini lebih menekankan pada kronologi kudeta militer yang terjadi. Militer memiliki peran penting dalam politik, ini dibuktikan oleh terjadinya kudeta yang didalangi oleh pihak militer. Pada tahun 2006 militer terlibat dalam politik, keterlibatan militer dalam politik yang disebabkan oleh faktor internal yaitu, nilai dan orientasi militer baik secara individu atau organisasi dan juga konflik kepentingan antara militer dan sipil. Faktor eksternal yang dimaksud yaitu ekonomi dan politik.

Faktor ekonomi disebabkan oleh korupsi yang dilakukan oleh Thaksin Shinawatra dan faktor politik yaitu terjadinya krisis politik yang disebabkan oleh kebijakan represif Thaksin Shinawatra dan juga tidak adilnya hasil pemilu yang dibuat oleh Thaksin Shinawatra. Dalam penelitian di atas hanya sedikit membahas mengenai posisi militer dalam sistem politik Thailand.

Hampir sama dengan apa yang peneliti buat tetapi ada perbedaan yaitu, dimana dalam pembahasan cenderung melihat pada hubungan sipil militer yang terjadi pada masa atau rezim Thaksin Shinawatra di Thailand.

Penelitian kedua adalah skripsi dari Surya Yudha Regif pada tahun 2009 dari Universitas Sumatera Utara yang berjudul *"Politik Luar Negeri Indonesia*

¹³ Sri Issundari, "*Latar Belakang Kudeta Militer Thailand Pada Masa Pemerintahan PM Thaksin Shinawatra*", jurusan Ilmu Hubungan Internasional UPN "Veteran" Yogyakarta, jurnal, Vol. 12, No. 4, Desember 2008.

Terhadap Thailand Pasca Kudeta Militer Thailand Pada Tahun 2006 Dalam Ruang Lingkup ASEAN".¹⁴ Dalam penelitian ini fokus kajiannya adalah kebijakan LN dan diplomasi Indonesia pada Thailand pasca adanya kudeta yang terjadi di 2006. Pasca kudeta politik yang terjadi di Thailand semakin jauh dari demokrasi, dan berbagai kekerasan melanda Thailand. Berbagai aksi demonstrasi yang saling membalas guna memecah belah menjadi dua golongan yaitu, pro pada (pendukung) Raja dan pro pada (pendukung) pemerintahan Thaksin Shinawatra.

Keamanan suatu kawasan selalu dipengaruhi oleh anggota negara - negara, suatu konflik yang terjadi berlarut - larut yang tidak bisa terselesaikan dengan segera bisa mengakibatkan hal - hal yang buruk bagi negara yang ada di kawasan. Indonesia merupakan negara anggota kawasan ASEAN yang mengkhawatirkan adanya campur tangan daripihak lainnya yang berharap hubungan antar negara ASEAN bergejolak.

Indonesia yang merupakan salah satu negara anggota ASEAN harus melakukan tindakan yang baik dan benar untuk mempertahankan kekuatan ASEAN, karena kudeta yang terjadi di Thailand yang termasuk dalam ruang lingkup ASEAN menyangkut mengenai masalah integrasi ASEAN pada tahun 2015 serta di tahun 2020 ASEAN Community, maupun kepentingan di kawasan lainnya dan di samping itu berkaitan dengan kepentingan nasional Indonesia.

Dalam penelitian di atas, peristiwa yang telah terjadi merupakan bentuk ketidakpuasan dan ketidakpercayaan rakyat Thailand kepada penguasa pada saat itu dan pihak militer diperalat sebagai instrumen eksekusi pelaksanaan, karena

¹⁴Surya Yudha Regif, *Politik Luar Negeri Indonesia Terhadap Thailand Pasca Kudeta Militer Thailand Pada Tahun 2006 Dalam Ruang Lingkup ASEAN*, Departemen Ilmu Politik, FISIP, Universitas Sumatera Utara, 2009.

pihak militer dianggap sebagai perintis modernisasi yang bersifat revolusioner. Pola budaya yang terjadi di masyarakat dan peranan Raja sangat berkaitan erat dalam perpolitikan di Thailand.

Penelitian ketiga yang dilakukan oleh Toto Dwi Prastio tahun 2010 yang berjudul *"Dampak Kudeta Militer Tahun 2006 Terhadap Perekonomian Thailand"*¹⁵ dalam penelitian ini bersifat deskriptif dengan memberikan gambaran mengenai perekonomian Thailand sebelum dan sesudah adanya kudeta militer pada tahun 2006. Fokus kajian dari penelitian ini adalah dampak kudeta militer terhadap ekonomi Thailand pada tahun 2006 dengan adanya pergantian pemerintahan yang terpilih melalui kudeta militer yang tidak demokratis, yang menimbulkan ketidakpuasan di berbagai kalangan, baik berpengaruh terhadap keamanan maupun stabilitas politik sehingga menjadi gangguan dalam proses perekonomian Thailand. Hal ini terlihat dari banyaknya aksi massa baik dari kubu pendukung Thaksin Shinawatra maupun massa anti Thaksin Shinawatra yang membuat kerusuhan di Thailand sehingga membuat kepercayaan investor menurun dan terjadinya kemerosotan pendapatan negara Thailand.

Penelitian ke-empat yang dilakukan oleh Reza Wirananto Gunarso yang berjudul *"Demokratisasi Thailand : Kajian Dinamika dan Proses Demokrasi di Thailand"*.¹⁶ Dalam penelitian ini membahas proses demokratisasi yang terjadi di Thailand sejak tahun 1997 hingga tahun 2010 masih didominasi dengan intervensi militer, karenanya bisa diketahui bagaimana posisi militer di Thailand. Negara

¹⁵Toto Dwi Prastio, *"Dampak Kudeta Militer Tahun 2006 Terhadap Perekonomian Thailand"*, Jurusan Hubungan Internasional, FISIP, Universitas Muhammadiyah Malang, 2010.

¹⁶Reza Wirananto Gunarso, *"Demokratisasi Thailand : Kajian Dinamika dan Proses Demokrasi di Thailand"*, Jurusan Hubungan Internasional, FISIP, Universitas Muhammadiyah Malang, 2013.

Thailand merupakan negara yang sering terjadi peristiwa kudeta militer. Kudeta yang terjadi telah menggagalkan proses demokratisasi di Thailand yang telah dibangun pada tahun 1932 dan tahun 1973. Peristiwa kudeta di Thailand terjadi karena terlalu besarnya pengaruh kekuatan militer dan pihak militer sering ikut campur dalam pemerintahan sipil yang biasa dikenal dengan istilah “*Pretorianisme*”.

Penelitian ini dilakukan dengan deskriptif kualitatif dan menggunakan konsep demokrasi yang dipergunakan untuk menentukan jenis serta pendekatan demokrasi yang telah terjadi di Thailand dan untuk menentukan bagaimana demokrasi yang telah dilakukan di Thailand. Konsep kudeta dan pretorian yang digunakan untuk menjelaskan dimana konsep kudeta dan pretorian merupakan hal yang sangat berpengaruh pada pasang surutnya demokrasi yang terjadi di Thailand.

Menurut penelitian ini, Thailand sudah berhasil membentuk demokrasi yang dimulai dari pemerintahan Pridi Phanomyong hingga pada masa pemerintahan Thaksin Sinawatra. Namun demokrasi yang telah dibangun di Thailand selalu saja ditandai dengan terjadinya kudeta. Jalannya jatuh bangun proses demokrasi yang terjadi di negara ini, karena tidak adanya pembagian antara pihak sipil dengan pihak militer baik secara konstitusional maupun secara institusional dan begitu besarnya pengaruh Raja dalam pemerintahan maupun perpolitikan di Thailand sebagai suatu unsur kenapa pihak militer selalu bertindak dan melampaui batas - batas yuridiksi sipil sebagaimana yang telah dijelaskan dalam kajian mengenai demokrasi.

Penelitian ke-lima adalah skripsi yang dilakukan oleh Yulia Kusumawardani yang berjudul *“Pengaruh Hubungan Raja - Militer di Thailand terhadap Konstitusi 2007”*.¹⁷ Dalam penelitian ini mencoba membahas bagaimana pengaruh hubungan Raja - militer di Thailand terhadap Konstitusi 2007. Untuk menjelaskan pengaruh Raja - militer, menggunakan teori militer, elit, peran Raja dan konstitusi. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik studi kepustakaan.

Hubungan Raja dengan militer di Thailand telah terbentuk sejak lama dan tidak mengalami masalah, sebelum Thailand menjadi negara monarki konstitusional. Namun, memasuki abad ke-20, hubungan ini semakin rapuh dikarenakan adanya modernisasi di Thailand. Pada tahun 1932, militer dengan sipil mengukudeta kerajaan dan mengubah negara Thailand dari monarki absolut ke monarki konstitusional. Militer bersama sipil menjadi penguasa dari perpolitikan Thailand.

Namun, hubungan Raja dan militer kembali terbentuk sejak pemerintahan perdana menteri Sarit Thanarat di tahun 1958. Sarit merupakan orang dari militer yang mempopulerkan Raja kepada masyarakat Thailand. Raja menjadi terkenal, sedangkan pemerintahan Sarit mendapat dukungan dari Raja. Dan sejak saat itu, peran Raja dalam perpolitikan Thailand semakin berkembang. Raja berperan aktif dalam politik Thailand melalui perwakilannya yaitu militer dan Dewan Penasehat Kerajaan.

¹⁷Yulia Kusumawardani, *“Pengaruh Hubungan Raja-Militer Di Thailand Terhadap Konstitusi 2007”*, Program Studi Ilmu Politik, FISIP, Universitas Indonesia, 2012.

Pada tahun 2001 merupakan peristiwa penting bagi rakyat Thailand karena pertama kalinya diadakan pemilu secara demokratis. Thaksin Shinawatra terpilih menjadi perdana menteri, dan memperoleh banyak dukungan dari rakyat Thailand karena program - programnya yang populis. Namun, setelah memerintah, pemerintahan Thaksin juga melakukan penyalahgunaan kekuasaan. Tindakan penyalahgunaan kekuasaan dianggap telah memecah belah rakyat Thailand. Bahkan ada isu bahwa Thaksin berusaha untuk mengganti Thailand ke bentuk republik. Oleh karena itu, militer meng kudeta Thaksin di tahun 2006. Setelah junta militer meng kudeta Thaksin, pihak junta membubarkan parlemen, dan membatalkan konstitusi. Pihak junta kemudian menjanjikan rakyat Thailand akan mengembalikan pemerintahan Thailand menjadi demokratis. Salah satunya adalah menyusun konstitusi baru untuk menggantikan konstitusi lama yaitu Konstitusi 1997.

Junta militer menyatakan bahwa penyalahgunaan kekuasaan yang terjadi pada masa pemerintahan Thaksin disebabkan adanya kelemahan dalam Konstitusi 1997. Untuk memastikan bahwa tidak akan ada lagi penyalahgunaan kekuasaan, junta militer meyakinkan kepada masyarakat bahwa akan menyusun konstitusi baru yang lebih demokratis dari konstitusi sebelumnya. Melalui referendum, konstitusi yang baru disahkan yaitu Konstitusi 2007. Junta militer menjanjikan kepada masyarakat Thailand bahwa Konstitusi 2007 akan menjadi konstitusi yang demokratis. Namun, fakta yang ada justru sebaliknya. Ini terlihat dari pasal - pasal yang ada dalam Konstitusi 2007, pasal - pasal yang dianggap tidak demokratis

adalah pasal - pasal yang berkaitan dengan kekuasaan eksekutif, pemilu dan demokratisasi.

Dari pasal - pasal ini terlihat bahwa, junta militer berusaha untuk menyusun suatu konstitusi yang berupaya untuk melarang Thaksin kembali berkuasa di Thailand dan memberikan porsi kekuasaan yang besar bagi militer. Pasal yang dimaksud adalah pasal mengenai Dewan Penasehat Kerajaan. Di Konstitusi 2007, Dewan Penasehat Kerajaan diberikan kekuasaan untuk memilih pengganti Raja apabila sampai meninggalnya Raja, dan Raja belum menunjuk penggantinya.

Pasal ini dimasukkan karena pihak junta militer menganggap kekuasaan Thaksin bisa mengganggu proses suksesi kerajaan yang hingga tahun 2012 masih belum jelas. Suksesi merupakan hal yang penting bagi militer karena selama ini militer mendapatkan perlindungan dari Raja. Namun, hingga tahun 2012, Raja Bhumibol belum memberikan sinyal mengenai penggantinya walaupun menurut hukum, anak lelakinya yaitu Pangeran Vajiralongkorn merupakan pewaris sah apabila Raja Bhumibol meninggal dunia. Pangeran Vajiralongkorn tidak diunggulkan sebagai penerus Raja selanjutnya karena kurangnya kharisma dan perhatian terhadap Thailand.

Menurut militer, apabila Pangeran Vajiralongkorn naik menjadi Raja, militer tidak akan lagi mendapat perlindungan. Sementara itu, bagi Kerajaan, naiknya Pangeran Vajiralongkorn bisa diartikan sebagai hilangnya pengaruh Kerajaan di masyarakat Thailand. Dari fakta yang ada, bisa dilihat tujuan dari penyusunan Konstitusi 2007 tidak untuk mengembalikan demokrasi di Thailand.

Konstitusi 2007 disusun oleh junta militer hanya untuk kepentingan beberapa elit yang berada dalam *network monarchy* yaitu militer dan Raja. Konstitusi 2007 hanya menjadi konstitusi yang melegalkan kekuasaan Raja dan militer. Pengaruh hubungan Raja dan militer dalam Konstitusi 2007 terbukti menjadi konstitusi yang tidak demokratis

Penelitian ke-enam adalah jurnal yang disusun oleh Harsa Arizki Nurulsrihanto yang berjudul "*Pengaruh Thaksin Shinawatra dan Terhadap Konflik Politik Internal di Thailand 2001 - 2014*".¹⁸ Penelitian tersebut membahas pengaruh dan faktor Thaksin Shinawatra terhadap politik - ekonomi pada masa pemerintahannya dan pasca peristiwa kudeta 2006 - 2014. Untuk membahas penelitian ini maka penulis menggunakan konsep *bureaucratic polity* dan legitimasi politik. Dengan metode penulisan deskriptif. Penulis menggunakan *bureaucratic polity* sebagai landasan berpikir untuk menganalisa bagaimana kultur politik yang ada di Thailand. Dan bisa menjelaskan seberapa besar pengaruh Thaksin Shinawatra terhadap militer dan para elit kelas menengah yang kontra terhadapnya. Dalam *bureaucratic polity*, demokrasi hanya dijalankan sebagai instrumen prosedural politik saja.

Teori legitimasi politik akan menjabarkan mengapa pasca turunnya Thaksin, Thailand terus mengalami ketidakstabilan atau krisis politik yang berkepanjangan. Pada pemilu 2001, Thaksin Shinawatra mendapatkan otoritas legal bersama partai TRT yang diusungnya dan dengan program - program populis yang pro rakyat. Pemulihan perekonomian Thailand pada masa krisis

¹⁸Harsa Arizki Nurulsrihanto, "*Pengaruh Thaksin Shinawatra dan Terhadap Konflik Politik Internal di Thailand 2001 - 2014*", Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Falsafah dan Peradaban, Universitas Paramadina, 2014.

akhir tahun 1990 merupakan adalah satu prestasi besar dalam pemerintahan Thaksin. Didalam bidang kebijakan ekonomi, Thaksin merumuskan kebijakan yang berseberangan dengan perdana menteri Chuan Leekpai yang selalu mengandalkan IMF.

Kebijakan yang dibuat Thaksin terbukti berhasil memperkuat ekonomi Thailand dan mampu mengeluarkan Thailand dari kebangkrutan. Dan yang menjadi faktor yang paling utama dalam menjelaskan mengapa pengaruh Thaksin mampu bertahan secara laten. Yaitu selama pemerintahannya, kebijakan - kebijakan populis Thaksin yang ditujukan kepada masyarakat miskin dan pedesaan, program populis tersebut antara lain kebijakan Perawatan Kesehatan sebesar 30 Baht (12.000 Rupiah), program Dana Desa, TAMC (*Thai Asset Management Corporation*), dan *One Tambon One Product Program*.

Program ini terbukti menurunkan tingkat belanja rumah tangga masyarakat miskin yang berdampak terhadap peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Dan Thaksin berhasil membangun basis pendukung yang sangat loyal, sehingga terbukti orang - orang tersebut terus mendukung Thaksin, terlihat pada demonstran kaus merah, dan kemenangan kerabat dan saudara Thaksin dalam pemilu - pemilu Thailand pasca kudeta 2006. Selain berhasil membangun perekonomian Thailand, Thaksin juga merupakan representasi kemenangan kelompok bisnis besar Thailand pasca terjadinya krisis ekonomi 1997.

Keberadaan kelompok bisnis besar Thailand dalam politik dilakukan sebagai cara dalam mengamankan kelompok bisnis mereka yang krisis oleh pelaksanaan kebijakan pada masa pemerintahan Chuan Lekpai yang tidak

berpihak pada kelompok pengusaha besar dalam negeri dan cenderung menguntungkan modal asing. Namun kekuasaan yang dimiliki oleh Thaksin justru ditujukan hanya untuk kepentingan kelompok bisnisnya sendiri sehingga menimbulkan kecemburuan di kalangan kelompok bisnis yang bukan bagian dari aliansi Thaksin. Kecemburuan ini menyebabkan kelompok bisnis menarik dukungannya terhadap Thaksin dan bergabung menjadi bagian dari kelompok penentang Thaksin yang kita kenal dengan sebutan massa kaus kuning hingga menimbulkan konflik yang berkepanjangan hingga saat ini.

Berbeda dengan peneliti diatas buat penulis cenderung menggambarkan bagaimana hubungan sipil militer itu terjadi dan berusaha memberikan informasi bagaimana hubungan sipil militer bisa memberikan pengaruh dalam proses demokratisasi pada masa pemerintahan Thaksin.

Tabel 1.1 Posisi Penelitian

No	JUDUL PENELITIAN DAN NAMA PENELITI	JENIS PENELITIAN DAN ALAT ANALISA	HASIL
1.	<p>Jurnal :</p> <p>“ Latar Belakang Kudeta Militer Thailand Pada Masa Pemerintahan PM Thaksin Shinawatra”</p> <p>Oleh : Sri Issundari Tahun 2008</p>	<p>Eksplanatif</p> <p>Pendekatan : Political economy</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Protes terhadap militer yang pernah dilancarkan oleh masyarakat tentang keterkaitan militer di ranah politik pada tahun 1991. • Dominasi kekuatan militer Thailand di latar belakang oleh anggapan bahwasanya militer dianggap lebih layak dan mampu dalam mengatasi masalah krusial di Thailand sedangkan sipil dianggap lebih lemah. Dan adanya persepsi militer Thailand mengenai demokrasi ala militer.
2.	Skripsi :	Deskriptif	<ul style="list-style-type: none"> • Politik luar negeri Indonesia

	<p>“Politik Luar Negeri Indonesia Terhadap Thailand Pasca Kudeta Militer Thailand Pada Tahun 2006 Dalam Ruang Lingkup ASEAN”</p> <p>Oleh : Surya Yudha Regif Tahun 2009</p>	<p>Pendekatan : Politik Luar Negeri, Diplomasi dan Kudeta</p>	<p>yaitu bebas aktif yang bahwasanya permasalahan internasional ditentukan dari sikap dan kebijakan politik luar negeri yang bebas bukanlah politik yang netral serta turut aktif dalam penyelesaian konflik berdasarkan pada UUD 1945.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kudeta militer yang dilakukan terhadap pemerintahan merupakan wujud dari ketidakpuasan rakyat terhadap penguasa. • Kestabilan ASEAN merupakan kestabilan antar negara anggota ASEAN, kestabilan politik di Thailand berarti kestabilan politik dan keamanan di ASEAN.
3.	<p>Skripsi :</p> <p>“Dampak Kudeta Militer Tahun 2006 Terhadap Perekonomian Thailand”</p> <p>Oleh : Toto Dwi Prastio Tahun 2010</p>	<p>Deskriptif</p> <p>Pendekatan : Pretorian, Kudeta, Politik Ekonomi, dan Indikator Ekonomi.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Munculnya kudeta tahun 2006 terhadap Thaksin merupakan wujud dari ketidakpuasan rakyat terhadap pemerintahan Thailand. Serta munculnya gerakan Anti Thaksin karena adanya indikasi korupsi pada pemerintahan ini. Dan adanya krisis politik di Thailand pada 2006 yang juga mengakibatkan adanya krisis perekonomian.
4.	<p>Skripsi :</p> <p>“Demokratisasi Thailand : Kajian Dinamika dan Proses Demokrasi di Thailand”</p> <p>Oleh : Reza Wirananto Gunarso Tahun 2013</p>	<p>Deskriptif kualitatif</p> <p>Pendekatan : Demokrasi, Kudeta dan Pretorianisme</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Militer mengintervensi dinamika demokratisasi di Thailand sejak tahun 1997 sampai tahun 2010, oleh karenanya bisa diketahui bagaimana posisi militer di Thailand. • Thailand berhasil membangun demokrasi namun selalu saja terjadi kudeta karena tidak adanya pembagian antara sipil dan militer.

5.	<p>Skripsi :</p> <p>“Pengaruh Hubungan Raja-Militer di Thailand terhadap Konstitusi 2007”</p> <p>Oleh : Yulia Kusumawardani Tahun 2012</p>	<p>Eksplanatif</p> <p>Pendekatan : Pretorianisme, Elit, peran Raja, dan Konstitusi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Hubungan Raja - militer di Thailand memiliki pengaruh terhadap Konstitusi 2007. Hubungan Raja - militer juga bisa dilihat dari pasal - pasal yang ada pada proses penyusunan draft Konstitusi 2007. Konstitusi 2007 bukanlah konstitusi yang demokratis melainkan suatu konstitusi yang hanya menguntungkan beberapa pihak saja yaitu Raja dan Militer.
6.	<p>Jurnal :</p> <p>“Pengaruh Thaksin Shinawatra Dan Terhadap Konflik Politik Internal Di Thailand 2001 – 2014”</p> <p>Oleh : Harsa Arizki Nurulsrihanto Tahun 2014</p>	<p>Deskriptif</p> <p>Pendekatan : Bureaucratic polity dan Legitimasi politik</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Thaksin Shinawatra mendapatkan otoritas legal dalam pemilu 2001, bahwa secara konstitusional merupakan pemimpin yang sah dengan mengusung partai Thai Rak Thai (TRT) yang merupakan partai pertama yang menang karena program-program populis. Thaksin Shinawatra juga merumuskan kebijakan yang berseberangan dengan pemerintahan perdana menteri Chuan Leekpai.
7.	<p>Skripsi :</p> <p>“Hubungan Sipil Militer Di Thailand Pada Masa Pemerintahan Thaksin Shinawatra”</p> <p>Oleh : Farida Feby Devisa Tahun 2019</p>	<p>Deskriptif</p> <p>Pendekatan : Hubungan sipil militer</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Hubungan sipil militer pada tahun 2001 - 2006 di Thailand pada masa pemerintahan Thaksin Shinawatra dan faktor - faktor penyebab terjadinya kudeta serta lengsernya pemerintahan Thaksin Shinawatra di Thailand.

1.5. Landasan Konsep

1.5.1. Konsep Hubungan Sipil - Militer

Sejak tahun 1945 konsep hubungan sipil - militer terjadi di Amerika Serikat. Konsep ini muncul dikarenakan oleh dua aspek utama yaitu adanya peralihan kondisi keamanan internasional pasca PD II, dan kemajuan ilmu sosial modern pada abad ke-20.¹⁹ Dalam penelitian ini, hubungan sipil militer yang terjadi di Thailand mempengaruhi perpolitikan negara, yang kemudian memicu munculnya konflik - konflik internal dan eksternal.

Evolusi hubungan sipil - militer semakin terkenal ketika munculnya tokoh Huntington dengan karangannya “The Soldier and The State”. Samuel Huntington berpendapat jika ada dua konsep yang bisa menjelaskan bagaimana kontrol sipil bisa dilakukan dalam suatu negara. Pertama, *Subjective Civilian Control (Maximizing Civilian Control)* yaitu kekuasaan sipil dimaksimalkan dalam hubungannya dengan militer. Inti dari subjective civilian control adalah pengingkaran sebuah independensi militer. Cara ini dapat menimbulkan hubungan antara sipil militer menjadi kurang sehat karena merujuk pada upaya untuk mengontrol militer.

Hal ini, paradigma menekankan (mengecilkan) kekuatan militer dan memperbanyak kekuatan kubu sipil dengan cara penguatan konstitusi negara-parlementer dan presidensial. Kedua, *Objective Civilian Control (Maximizing Military Professionalism)*, yaitu meninggikan profesionalisme militer serta memperlihatkan bahwa adanya pemisahan kekuasaan perpolitikan antara pihak

¹⁹Peter Douglas Fever, 1999, “Civil - Military Relations”, *Annual Review of Political Sciences Vol. 2*, North Carolina : University of Kentucky, hal. 212.

militer dengan pihak sipil yang mendukung menuju sikap profesional.²⁰ Kekuasaan militer akan dikurangi namun tetap diberikan kekuasaan terbatas dalam batas waktu tertentu yang diperlukan untuk melaksanakan profesinya.

Dua konsep Huntington, meletakkan aktor militer menjadi aparat negara yang mempunyai tanggung jawab untuk mempertahankan negara akan tetapi tidak memisahkan sejarah ideologi dan prinsip moral dari evolusi negara yaitu *non - political professional military*. Aparat negara ini lalu membuat misi teknis operasional dengan cara mempergunakan power persenjataan guna melindungi kedaulatan politik dan kawasan negara di bawah kendali kontrol politik sipil yang sah.²¹

Dalam hubungan sipil militer di Thailand, meskipun terkesan terdapat *division of labor* antara birokrasi militer dan komponen sipil, militer bertanggung jawab terhadap keamanan nasional.²² Ironisnya, tanggung jawab keamanan nasional seringkali diterjemahkan sebagai intervensi militer dalam politik dan pemerintahan, hal ini bisa dilihat dari seringnya diterapkannya keadaan darurat militer, seringnya terjadi kudeta dan tindakan represif pemerintah untuk menekan gerakan subversi.²³

Jika ditelaah dengan adanya konsep hubungan sipil militer karangan Huntington, hubungan antara sipil dan militer yang terjadi di Thailand tidak bisa

²⁰Samuel P. Huntington, 1959, *The Soldier and The State, The Theory and Politics of Civil - Military Relations*, Cambridge, Massachussets : the Belknap Press, of Harvard University Press, hal. 80-83.

²¹Jaleswari Pramodhawardani, *Satu Dekade Reformasi Militer Indonesia*, Pelatihan SSR IV Advokasi Masyarakat Sipil Untuk Reformasi Sektor Keamanan, LIPI, Desember 2008, hal. 21.

²²John L.S. Girling, 1981, *The Bureaucratic Polity in Modernizing Societies : Similarities, Differences and Prospects in the ASEAN Region*. Singapore : ISEAS, hal. 31.

²³*Ibid.*

berjalan lancar dan sering terjadi adanya ketegangan konflik yang berakhir dengan kudeta militer yang menyebabkan terjadinya ketegangan politik yang berkelanjutan dikarenakan profesionalitas pihak militer saling berpengaruh dalam perpolitikan Thailand. Jikalau pihak penguasa memperlakukakan militer sebagai alat perubahan sosial maka ketegangan dalam hubungan sipil militer bisa saja terjadi.²⁴

1.6. Metodologi Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis yaitu jenis penelitian kualitatif dengan metode penelitian deskriptif. Penelitian ini berkaitan dengan pengumpulan data untuk memberikan gambaran atau penegasan suatu konsep atau gejala.²⁵ Penelitian deskriptif berusaha mendeskripsikan dan menginterpretasi kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang sedang tumbuh, proses yang sedang berlangsung, akibat yang sedang terjadi, atau kecenderungan yang tengah berkembang.

Teknik deskriptif digunakan dalam penelitian ini untuk membantu peneliti dalam menjelaskan data yang diperoleh peneliti dalam menyusun pola dalam fenomena yang terjadi, kemudian berusaha menggambarkan persoalan - persoalan secara sederhana dan sistematis dengan teori dan konsep, biasanya dengan pertanyaan sebagaimana dalam rumusan masalah.

²⁴Edward R. Taylor, 1998, *Command in The 21st Century : An Introduction of Civil-Military Relations*, (California : United State Naval Academy), hal. 30.

²⁵Sumanto, 1990, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*. Jakarta : Andi Offset, hal. 6.

1.6.2. Sumber Data Dan Teknik Pengumpulan Data

1.6.2.1. Sumber Data

Peneliti menggunakan data sekunder yang diperoleh dari sumber lain yang masih berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan. Data - data yang diperoleh dari metode dokumentasi dan telaah, serta bahan - bahan pustaka yang dapat dijadikan acuan untuk menjawab rumusan masalah tersebut.

1.6.2.2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan mencari beberapa sumber data, baik dari sumber pustaka maupun mencari data - data dari sumber internet baik tulisan, artikel, jurnal ilmiah maupun literatur. Bahan yang digunakan untuk menganalisa masalah dengan menggunakan teknik pengumpulan data secara studi kepustakaan, sehingga bahan penelitian diperoleh dengan melakukan studi pustaka dari berbagai sumber sekunder, baik berupa buku, koran, artikel dan jurnal serta dari situs internet.

1.6.3. Teknik Analisa Data

Teknik analisa data dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif, dimana dari beberapa sumber informasi yang didapat baik dari kepustakaan, internet, artikel dan jurnal ilmiah tersebut dianalisa yang kemudian diteliti dan dapat dilakukan penarikan kesimpulan. Teknik analisa data ini berusaha menguraikan dan menggambarkan segala informasi yang didapat berkaitan dengan permasalahan yang dibahas yaitu menyangkut keadaan demokratisasi di Thailand serta hubungan sipil militer pada masa pemerintahan Perdana Menteri Thaksin Shinawatra.

Adapun proses analisis data kualitatif yang dilakukan adalah:

- A. Membaca atau mempelajari data, menandai kata - kata kunci dan gagasan yang ada didalamnya.
- B. Mempelajari kata kunci, dan berupaya menemukan tema - tema yang berasal dari data.
- C. Menuliskan model yang ditemukan²⁶.

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa pada umumnya metode deskriptif kualitatif hanya berusaha menggambarkan berdasarkan fakta dan data yang didapatkan yang berkaitan dengan masalah yang dibahas, maka demikian pula dengan apa yang penulis buat disini.

1.6.4. Ruang Lingkup

Dalam suatu penelitian diperlukan adanya batasan waktu dan materi untuk membatasi waktu dan pembahasan yang diteliti agar tidak melebar kemana - mana sehingga bisa di dapatkan hasil penelitian yang tepat dan akurat.

1.6.4.1. Batasan Waktu

Peneliti membuat batasan waktu di tahun 2001 - 2006, karena di tahun ini terjadi lagi kudeta di Thailand setelah 15 tahun tidak terjadi kudeta. Dan lengsernya pemerintahan Perdana Menteri Thaksin Shinawatra.

1.6.4.2. Batasan Materi

Agar materi tetap konsisten, maka peneliti dalam pembahasan ini memberi batasan sesuai keinginan. Peneliti ingin tahu bagaimana hubungan sipil dan

²⁶Lexi J. moleong. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, hal. 5.

militer dalam mempengaruhi proses demokratisasi di Thailand pada masa pemerintahan Perdana Menteri Thaksin Shinawatra.

1.7. Argumen Dasar

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan, maka penulis menarik argumen dasar penelitian bahwa, hubungan sipil militer di Thailand pada masa pemerintahan Thaksin Shinawatra didominasi oleh pihak militer. Militer seringkali merebut kekuasaan dari pemerintah sipil dengan cara kekerasan dengan kekuatan luar biasa untuk memveto terhadap pemerintah non - militer. Hampir semua pelengseran Perdana Menteri di Thailand sejak tahun 1932 selalu dilatar belakangi oleh pihak militer.

Kudeta yang terjadi pada masa pemerintahan Perdana Menteri Thaksin Shinawatra dikomandoi oleh Jenderal Sonthi Boonyaratglin dan didukung oleh Raja Bhumibol Adulyadej yang kemudian Jenderal Sonthi lah yang mengambil alih kekuasaan. Disini jelas terlihat bahwa adanya campur tangan dari pihak militer terhadap politik di Thailand. Hal ini dapat dilihat bahwasannya pada masa pemerintahan Perdana Menteri Thaksin Shinawatra di Thailand termasuk dalam *subjective civilian control* karena pada masa pemerintahannya, Thaksin ingin memaksimalkan kekuasaannya dan meminimalkan kekuasaan militer.

1.8. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN	1.1. Latar Belakang 1.2. Rumusan Masalah 1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian 1.3.1. Tujuan Penelitian 1.3.2. Manfaat Penelitian 1.4. Penelitian Terdahulu 1.5. Landasan Konsep 1.6. Metodologi Penelitian 1.7. Argumen Dasar 1.8. Sistematika Penulisan
BAB II KUDETA MILITER DAN DEMOKRATISASI THAILAND	2.1. Posisi Militer dalam Politik Thailand 2.2. Dinamika Kudeta Militer di Thailand
BAB III HUBUNGAN SIPIL DAN MILITER DALAM PROSES DEMOKRATISASI DI THAILAND PADA MASA THAKSIN SHINAWATRA	3.1. Pola Hubungan Sipil Militer di Thailand 3.2. Demokratisasi di Thailand
BAB IV PENUTUP	4.1. Kesimpulan 4.2. Saran